

Diskontinuitas Sejarah Bali Abad XIX: Alternatif Mempelajari Masa Lampau melalui Pendekatan Postmodern

I Nyoman Wijaya*

Universitas Udayana, Bali, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p15>

Sejarah pemikiran, pengetahuan, filsafat, sastra
tampaknya mencari, dan menemukan,
semakin banyak diskontinuitas,
sedangkan sejarah total
mengabaikan gangguan peristiwa
demi struktur yang stabil.

Michel Foucault,

The Archaeology of Knowledge [1972]

Abstract

Discontinuity in 19th Century Balinese History: Alternative Approaches to Studying the Past through a Postmodern Lens

This study discusses the discontinuity of the history of Bali in the nineteenth century. The collapse of the Klungkung Kingdom in 1908, positioned as the present, serves as a starting point. It then moves backwards to 1849, which marked the beginning of the collapse of the Balinese kingdoms into the hands of the Dutch colonial government. Then it moves forward to form a periodization, but with a different frame of mind. The periodization is not connected to the present, but it is only used as a method to identify the location of historical discontinuities. The goal is merely to view whether an event brings new ideas that can make the old knowledge undergo ruptures, fractures, thresholds, accidents, and transformations. Using Foucault's method of archaeology of knowledge combined with the theory of radical contingency, this study manages to demonstrate that the power after the fall of the Buleleng kingdom formed new knowledge which created the discontinuity of history in Bali in the nineteenth century.

Keywords: continuity; discourse; knowledge; power; obedience; Bali history

* Penulis Koresponden: iwijayastsp@yahoo.co.id

Artikel Diajukan: 14 Juni 2023; Diterima: 7 Oktober 2023

1. Pendahuluan

Pandangan yang menganggap masa kini dipengaruhi oleh masa lampau dianut oleh orang-orang yang sepakat bahwa sejarah berjalan secara linier. Masa kini diyakini merupakan kesinambungan dan bahkan dibentuk oleh masa lampau. Mereka memungkirkan dalam perjalanan, sejarah akan selalu muncul diskontinuitas (*the breaks*) mulai dari yang amat radikal berupa retakan, patah, ambang, kebetulan, hingga transformasi (Foucault, 1972). Transformasi disebut pula perubahan bentuk merupakan diskontinuitas sejarah paling halus duplikasi masa lampau, sehingga sejarah seolah-olah tampak sama padahal sesungguhnya berbeda.

Atas dasar itu, penting sekali memberikan kesadaran kepada para pemula, orang-orang yang belum mengenal cara kerja pendekatan postmodern dalam penulisan sejarah, sehingga paham bahwa tidak semua sejarah berjalan secara linier, karena ada pula yang mengalami diskontinuitas (Hunt, Ed., 1989; McCullagh, 1998; McCullagh, 2004; Munslow, 1997). Sebagai ilustrasi terdekat sejarah diskontinuitas, tidak ada yang pernah menyangka kenyamanan sejarah pariwisata Bali diretakan oleh tragedi Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005). Peristiwa itu sempat membuat frustrasi orang-orang yang mempunyai kuasa berbicara atas nama pariwisata Bali.

Tragedi Bom Bali dan disusul pandemi Covid-19 tahun 2020 merupakan contoh kecil peristiwa diskontinuitas sejarah di masa kini, yang penyebabnya harus dicari pada masa kini pula. Inilah tugas berat para sejarawan diskontinuitas. Bagaimana mencari sebab-sebab terdekat dari suatu peristiwa seperti yang diajarkan oleh sejarawan McCullagh (1998) dalam barisan peristiwa dari masa kini ke masa lampau. Oleh karena itu studi ini ingin mengajak semua pihak, terutama orang-orang yang masih berketat dalam sejarah linier bersedia menyimpan sejenak ilmunya supaya bisa mengerti bahwa ada kalanya (bukan berarti) semua sejarah mengalami diskontinuitas (Foucault, 1972).

Tercatat dalam sejarah Bali, kebiasaan membayangkan sejarah berjalan secara linier menjadikan begitu banyak orang mencari titik temu masa kini ke masa lampau, antara lain dengan cara melacak asal-usul leluhurnya ke masa yang sangat jauh (Nordholt, 1996; Nordholt, 2002; Wijaya, 2010). Padahal pelacakan garis leluhur bergoyang melampaui dirinya sendiri, yang oleh Foucault (1977, p, 275) disebut sejarah metasifik, sehingga tidak mungkin mampu mencari dan menemukan kebenaran garis leluhur hingga awal mula teriptanya manusia. Suatu hal yang bisa dilakukan hanya mencari dan menemukan salah satu dari divisi, leluhur yang dianggap pantas diposisikan sebagai dewa dan harus dihormati (Bagus, 1961 dalam Wijaya, 2012).

Lagi pula hasil pelacakan itu bukan berupa salah satu dari fondasi yang kekal, melainkan hanya transformasi (perubahan bentuk) yang berfungsi

sebagai fondasi baru. Akan tetapi ketidaktahuan terhadap diskontinuitas sejarah menjadikan banyak sekali orang melacak garis asal-muasal leluhurnya hingga zaman kerajaan di Jawa abad XI hingga XIV (Nordholt, 1966), sehingga di sana-sini menimbulkan konflik sosial (Bagus, 1969; Bagus, 1974; Bagus, 1975).

Banyak pula energi positif orang Bali yang terbuang untuk mengurus hak dan kewajiban masing-masing klan. Ada yang ribut merebut posisi leluhur siapa yang lebih mulia dan lebih terhormat. Perang posisi pun terjadi karena itu (Nordholt, 2002; Gde Agung, 1989; Putra Agung, 2001a; Putra Agung, 2001b). Melalui tata aturan perkawinan ditentukan siapa boleh menikahi siapa, bagaimana seharusnya memberikan nama kepada anak, dan bagaimana semestinya membuat simbol-simbol identitas saat upacara kelahiran dan bahkan ketika sudah almarhum. Banyak sekali *paswara* (aturan) yang dibuat untuk memberi hukuman fisik, penjara, pengasingan, dan bahkan pembunuhan atas pelanggarnya (Wijaya, 2010).

Demi mencapai tujuan kemuliaan tradisi, di zaman kolonial Belanda pada tubuh sosial banyak yang tak segan menghabiskan waktu, energi, dan bahkan materi untuk meraih gelar kebangsawanan melalui pengadilan, disebut Gusti Ponnis (Vickers, 1989). Asalkan hakim sepakat dengan argumentasi dan bukti-bukti, antara lain bisa makan satu porsi berdua dengan seorang bangsawan, maka gelar gusti pun bisa diraih (Panetja, 1986). Gelar gusti bisa dipakai untuk membebaskan diri dari kerja kasar dalam sistem kerja rodi. (Wijaya, 2010; Nordholt 2002). Pada tubuh sosial (Foucault, 1980) relatif banyak sekali waktu dan energi terbuang untuk memikirkan bagaimana sebuah pola tunggal, bagaimana identitas budaya harus dibentuk dengan nama 'Bali Lestari' dengan berbagai duplikasinya pada setiap zaman. Pada kenyataannya semua itu hanya merupakan upaya membentuk sebuah budaya tunggal yang disisipi oleh berbagai faktor saling mempengaruhi antara penerusan, penghilangan, dan pengulangan suatu peristiwa (Wijaya, 2010).

Penelusuran sejarah yang dimulai dari masa kini seperti tersebut di atas sejalan dengan cara kerja sejarah poststruktural, yang lahir dari teori poststrukturalis Foucault, yang merupakan salah satu unsur dalam pendekatan postmodern (Neuman, 2014). Sejarah poststruktural masih termasuk langka dalam historiografi Bali, antara lain dapat dilihat dalam Wijaya (2015) dan Wijaya (2022). Dalam sejarah poststruktural, tahapan-tahapan historis yang niscaya seperti feodalisme dan kapitalisme digantikan dengan keterputusan, kontingensi [ketidakpastian], dan kebetulan dalam pembentukan dinamika kultural dan institusional. Sejarah poststruktural bukan mencari sesuatu yang diketahui dan bersifat linier seperti dalam sejarah struktural, melainkan terkait dengan pandangan kekuasaan dan kebenaran. Jantung sejarah pada hakekatnya

chaotic [kacau], bukan kemampuan menyingkap rencana dan tatanan seperti dalam sejarah linier (Aur, 2006, p. 149).

Sejarah poststruktural membutuhkan metode arkeologi pengetahuan yang meminta peneliti sejarah tak lagi melacak suatu peristiwa dari fondasi-fondasi yang kekal, kecuali salah satu dari berbagai transformasi yang berfungsi sebagai fondasi-fondasi baru bagi pembangunan kembali fondasi-fondasi yang melahirkan sejarah baru.

Melalui metode inilah sejarah poststruktural melahirkan diskontinuitas sejarah. Artinya jika sejarah masa kini dibentang ke masa lampau untuk menemukan insitu suatu peristiwa sejarah, maka akan ditemukan banyak diskontinuitas, namun tidak semuanya berupa patahan, retak, dan ambang, namun ada juga dalam wujud transformasi. Contohnya, mayoritas masyarakat Bali masa kini masih beragama Hindu, namun praktik keagamanya bukanlah Hindu di awal sejarahnya, melainkan hanya duplikasinya saja. Kelihatannya sama, namun pada dasarnya tidak.

Atas dasar itu, studi ini akan difokuskan pada diskontinuitas sejarah Bali abad XIX dengan bertitik tolak pada peristiwa besar yang terjadi di tahun 1908. Dibawa turun ke masa lampau untuk mencari ujungnya di tahun 1849. Lalu dibentang lagi hingga kembali ke tahun 1908 yang merupakan akhir masa kekuasaan rezim bentukan Majapahit di Bali yang berlangsung hampir lima abad, sedangkan tahun 1849 merupakan awal dari dipatahkannya sejarah Bali oleh pemerintah kolonial Belanda ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Buleleng (Gde Agung, 1989; Nordholt, 1981).

Pertanyaan penelitiannya, bagaimanakah kekuasaan pasca-keruntuhan kerajaan Buleleng membentuk pengetahuan baru di abad XIX? Pengetahuan apa saja yang berhasil dibentuk pada abad XIX. Jawabannya dicari pada sejumlah dokumen kolonial yang sezaman. Sekaligus pula untuk mengetahui sejauhmana kelebihan maupun kekurangannya dalam penulisan diskontinuitas sejarah Bali abad XIX, yang juga merupakan pertanyaan penelitian dalam studi ini.

Sejarah diskontinuitas semakin banyak ditemukan pada sejarah pengetahuan, sejarah pemikiran, sejarah filsafat, dan sejarah sastra, sedangkan sejarah total mengabaikannya demi struktur yang stabil (Foucault, 1972) seperti disebut di awal artikel ini. Melalui studi sejarah pengetahuan, sejarawan akan dapat mempelajari episteme. Ada tiga komponen diskursif yang membentuk episteme, yakni disiplin ilmu, institusi, dan tokoh. Ketiganya sangat menentukan bagaimana suatu fenomena dikategorisasikan, didefinisikan, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Kombinasi ketiganya menghasilkan satu mesin kebenaran untuk berbicara tentang peradaban yang seharusnya. Di luar itu, semua adalah omong-kosong yang menyesatkan (Adian dalam Rabinow, 2002, pp. 23-24).

2. Kajian Pustaka

Sampai saat ini, Bali abad XIX baru dipelajari melalui perspektif sejarah politik dengan materi pembahasan yang cukup mendalam. Pertama, karya Gde Agung (1989) yang mengupas tuntas hampir seluruh sejarah politik Bali abad XIX yang disusun secara kronologis. Uraianannya dimulai dari kondisi politik Bali menjelang abad XIX sebagai dasar analisis untuk melihat peristiwa-peristiwa politik di abad XX, yang dibagi menjadi lima bab. *Satu*, usaha-usaha pemerintah kolonial Belanda menjalin hubungan politik dengan raja-raja Bali (1808-1830). *Dua*, usaha-usaha pemerintah kolonial Belanda menaklukkan Bali melalui kamufase perdagangan (1830-1845). *Tiga*, perang Buleleng, Jagaraga, dan Kusamba (1849). *Empat*, perkembangan dan konstelasi politik di Bali (1850-1900); *Lima*, ekspedisi militer meliputi perang Badung (1906) dan perang Klungkung (1908).

Kedua, karya Nordholt (1996) yang dengan cukup teliti membicarakan sejarah politik Bali abad XIX dengan menjadikan kerajaan Mengwi sebagai titik tolaknya. Kronologi sejarahnya berupa empat tahap pembabakan waktu. *Satu*, krisis politik yang terjadi di kerajaan Mengwi (1770-1823). *Dua*, restorasi politik di kerajaan (1823-1871). *Tiga*, bencana dan kehancuran politik di kerajaan Mengwi (1872-1891). *Empat*, penetrasi politik pemerintah kolonial Belanda di Mengwi (1892-1908).

Tampak jelas, baik Gde Agung maupun Nordholt, dengan gigih menyusun sejarah berdasarkan kronologi waktu yang sangat ketat, lalu menyambung satu sama lain untuk mendapatkan sebuah struktur sejarah yang stabil. Inilah yang disebutkan sebagai sejarah struktural (Wijaya, 2013). Sebagai sebuah sejarah poststruktural, studi ini akan melampauinya dengan memakai metode arkeologi pengetahuan seperti dijelaskan di bawah ini.

3. Metode dan Teori

3.1 Metode

Kerangka pemikiran Foucault bisa diturunkan menjadi metode penelitian. Seperti dikatakan Costa & Murphy (2015, p. 1), pada setiap teori besar pada umumnya mengandung metode dan metodologi, antara lain terlihat dalam teori Bourdieu. Termasuk juga teori Foucault (1977, pp. 139-164) juga punya metode penelitian tersendiri, yang disebut genealogi kekuasaan dan arkeologi pengetahuan. Metode ini terpakai dalam studi ini terutama untuk mempelajari diskontinuitas sejarah.

Pelacakan data dilakukan ke bawah untuk bisa menemukan apakah ada patahan, retakan, keterputusan atau transformasi (perubahan bentuk wacana dalam suatu rentang sejarah (Foucault, 1982, p.169). Data dengan mudah dicari dalam dokumen kolonial terutama *Koloniaal Verslag* (KV) yang tentunya harus

melewati kritik sumber cukup ketat. Dengan cara ini akan terlihat bagaimana orang Bali pada abad XIX mulai mengikuti secara pelan-pelan dan terus menerus diskursus baru yang rasional yang dilontarkan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara (Foucault, 1980) di abad XIX.

Melalui metode arkeologi pengetahuan, sebab-sebab terdekat dari suatu peristiwa sejarah dapat dicari dan ditemukan, karena konsep tentang sebab mencakup ide mengenai sesuatu yang menciptakan pengaruhnya (McCullagh, 1998, p. 177). Pada setiap tahapan diskontinuitas sejarah baik berupa retakan, patahan, ambang, kebetulan, keterputusan maupun transformasi punya sebab-sebab terdekatnya masing-masing.

3.2 Teori

Teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault berdekatan dengan teori kontingensi radikal. Teori ini dapat dipakai untuk memperkuat landasan berpikir studi ini. Ada dua konsep penting dalam teori kontingensi radikal yakni artikulasi dan disartikulasi, yang merupakan hasil modifikasi konsep hegemoni Gramsci. Artikulasi, menghubungkan dua hal yang terpisah antara bagian depan (kabin) dan belakang (*trailer*) pada truk. Kedua bagian tersebut sebenarnya dapat dipisah, tidak perlu dikaitkan satu sama lain, namun keduanya terhubung satu sama lain, melalui keterkaitan tertentu, dan dapat diputus.

Jadi, artikulasi adalah bentuk koneksi yang dapat menyatukan dua elemen berbeda dalam kondisi tertentu. Ini adalah hubungan yang tidak perlu, ditentukan, mutlak dan esensial untuk semua waktu. Peneliti harus bertanya dalam keadaan apa koneksi bisa dipalsukan atau dibuat? Disartikulasi, diartikan sebagai mengartikulasikan kembali kesatuan wacana dengan cara yang berbeda karena mereka tidak memiliki 'kepemilikan' yang diperlukan (Hobart, 2000, pp. 27-31). Dalam bahasa yang lebih sederhana, artikulasi adalah upaya untuk menyeleraskan (*ngadungan*) dua hal berbeda, yang semestinya tidak perlu dipermanenkan, sedangkan disartikulasi bisa diartikan sebagai upaya memisahkan kembali penyelarasan yang dipermanenkan itu.

Bentuk artikulasi yang riil dapat dilihat pada konsep budaya yang bisa pula diterapkan dalam kekuasaan Foucault (1980). Dengan demikian mengacu Foucault (1970, dalam Hobart, 2000) budaya adalah artikulasi atau penyelarasan yang kuat dari orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa untuk berbicara, sehingga dengan wacana-wacana yang menyertainya dia mampu mendefinisikan dunia modern, tapi akhirnya didisartikulasikan oleh antagonismenya sendiri. Teori ini dapat dipakai untuk memahami pertarungan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Pertarungan antara kontinuitas dan diskontinuitas sejarah. Pertarungan itu berlangsung melalui

adu diskursus. Diskursus tidak diartikan sebagai sekedar wacana, melainkan wacana yang mengandung pengetahuan berbeda dengan episteme peradaban lama (Foucault, 1997, p. 201).

Episteme adalah karakteristik suatu peradaban yang dilandasi oleh pengetahuan orang-orang yang punya kuasa berbicara atas nama daerahnya. Episteme bisa juga disebut sebagai prinsip-prinsip dasar berpikir yang diatur dalam pemikiran. Episteme merupakan struktur pemaknaan suatu zaman yang terbentuk dari himpunan berbagai pengetahuan beraturan tentang banyak hal antara lain dunia, ilmu pengetahuan, dan filsafat yang khas pada suatu kelompok masyarakat (Foucault, 1997, p. 201).

Seketika setelah episteme disadari manusia menjadi tahu bahwa mereka telah melihat bagian dari kenyataan dengan cara tertentu dan dengan demikian terbuka kenyataan yang lain. Dalam episteme peradaban primitif misalnya, setiap benda yang bisa terbang di langit adalah burung. Oleh karena itu saat pertama kali melihat kapal terbang di langit, maka akan disebut burung. Begitu episteme disadari, maka muncul kesadaran baru bahwa kapal terbang bukanlah burung (Ankersmit, 1987, pp. 311-312)

Semakin kuat diskursus, semakin cepat pula suatu masyarakat menyadari episteme lamanya, berarti pula semakin besar pula peluang terjadinya diskontinuitas sejarah yang bisa berupa patah, retak, ambang, putus atau transformasi [perubahan bentuk] suatu peradaban. Diskontinuitas terjadi karena munculnya diskursus dari orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara dalam sebuah peradaban. Akan tetapi bagaikan sebatang korek api, begitu menyala subjek pemantikanya tidak ada lagi karena sudah menyatu dengan realitas sosial.

Diskursus yang terlontar sudah terjalin dengan aspek-aspek lain dalam sebuah sistem sosial secara menyeluruh. Pada saat itulah kekuasaan berubah menjadi strategi yang difungsikan sebagai teknik, taktik, manuver, dan disposisi untuk menjadikan tubuh monarki, tubuh republik, tubuh sosial, tubuh fantasi, dan tubuh ideologi (Foucault, 1980) berdisiplin, dalam arti patuh dan berguna pada kebenaran yang terkandung di dalam suatu diskursus. Foucault mengartikannya sebagai strategi kuasa, di mana kuasa dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran (Kebung, 2002, p. 34).

4. Hasil dan Pembahasan

Artikulasi dan disartikulasi selalu berulang dalam sejarah dan yang sama halnya dengan berulangnya kontinuitas dan diskontinuitas. Orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa bicara dalam suatu hal selalu berusaha melakukan artikulasi untuk memaksakan pengetahuan baru miliknya, lalu didisartikulasikan oleh antagonismenya sendiri, maka muncullah pengetahuan baru (Hobart, 2000).

Foucault (1980) mengatakan, semua pengetahuan adalah mungkin dan terjadi hanya dalam sistem relasinya dengan kekuasaan. Relasi itu memungkinkan munculnya pengetahuan baru sehingga wacana yang terbentuk darinya dapat diterima sebagai “kebenaran” dalam konteks apa pun dia diucapkan, dan juga agar wacana menghasilkan apa yang dianggapnya sebagai pengetahuan yang menyasarkan pendisiplinan tubuh-tubuh. Diawali dengan mendisiplinkan tubuh monarki (raja-raja Bali).

Artikulasi dan disartikulasi diskursus dalam sejarah Bali abad XIX berlangsung melalui sejumlah kebijakan pemerintah kolonial Belanda seperti yang diraikan di bawah ini.

4.1 Situasi Buleleng dan Jembrana Zaman Kolonial

4.1.1 Penataan Kekuasaan

Langkah pertama pemerintah kolonial dalam menjalankan kekuasaannya adalah membubarkan kerajaan Buleleng. Kepemimpinan Buleleng diserahkan kepada raja Bangli. Tapi, terjadi protes oleh orang-orang yang mempunyai kuasa berbicara di masa prakolonial di mana-mana. Raja Bangli tidak tahan, lalu menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintah kolonial.

Setahun berlalu, situasi dan kondisi politik di Buleleng belum begitu aman. Oleh karena itu dipandang perlu menempatkan sebuah perahu perang di perairan Bali dan Lombok. Semula hanya sebuah kapal sekoci *de Huzaar*, lalu diganti dengan kapal perang *Janus*. Secara berkala mereka mulai dilakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Bali-Lombok (KV, 1850, p. 26).

Tak pernah diduga oleh rakyat Buleleng, istana di mana dulu mereka menunjukkan kepatuhan, kini tidak lagi dihuni rajanya. Tentu sangat menarik jika ada peneliti terdahulu yang bisa melukiskan sejarah kejiwaan rakyat Buleleng saat itu. Apakah mereka merasa bergembira sorak-sorai ataukah memendam amarah karena kebanggaannya sebagai warga Buleleng sudah tidak ada lagi. Suatu hal yang bisa diinterpretasikan semua pihak hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang akan menyentuh langsung dirinya sebagai rakyat kecil.

Hal lain yang bisa diinterpretasikan, keruntuhan kerajaan Buleleng merupakan peristiwa penting dalam sejarah Buleleng, karena menyangkut terbentuknya pengetahuan baru masyarakatnya. Pertama kalinya dalam sejarah rakyat Buleleng dapat melihat patahnya kekuasaan monarki. Sebelum itu, tubuh raja merupakan realitas politik. Perkataannya adalah hukum positif. Raganya diperlukan demi dapat berfungsinya kekuasaan monarki. Kekuasaan monarki kini patah digantikan oleh kekuasaan baru yang disebut teknologi produktivitas kekuasaan.

Sebelumnya, kekuasaan tak hanya mengembangkan monarki, tetapi juga aparatur negara yang besar berupa birokrasi tradisional lengkap dengan lembaga penghukumnya. Berbeda dengan sebelumnya 'ekonomi' kekuasaan baru ini berupa prosedur yang memungkinkan efek-efek kekuasaan beredar dengan cara yang terus menerus, tanpa gangguan, diadaptasi dan 'diindividualkan' di seluruh tubuh-tubuh (dikembangkan dari Foucault, 1980, p. 119).

Bali, terutama Buleleng dan Jembrana pun menjadi pertarungan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dibuang. Pertarungan itu berlangsung melalui adu diskursus baru dengan diskursus peradaban lama. Karakteristik peradaban Bali pun berubah seiring dengan masuknya pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Prinsip-prinsip dasar berpikir masyarakatnya juga mulai berubah. Demikian pula struktur pemaknaannya tentang dunia, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan raja dan pengetahuan juga berubah, ada yang patah, retak, ambang, dan mengalami transformasi (perubahan bentuk).

Sejak itu muncul sebuah kebenaran baru, bahwa raja dan kerajaan bukanlah kebenaran mutlak sebagai perwakilan para dewa di dunia. Kerajaan bukan pula representasi sorga bagi orang-orang yang patuh dan berguna kepadanya dan neraka untuk orang-orang yang berani menentanginya. Mesin kebenaran yang berbicara tentang peradaban bergeser ke diskursus baru yang dikembangkan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara di kalangan pemerintah kolonial.

Jadi, semakin kuat suatu kebenaran baru merasuk ke tubuh-tubuh sosial semakin besar pula peluang terjadinya diskontinuitas sejarah. Pengetahuan baru itu tersembunyi rapi dalam berbagai diskursus yang dikembangkan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara dalam jajaran pemerintah kolonial Belanda, seperti terurai di bawah ini.

4.1.2 *Penataan Birokrasi*

Pengetahuan baru yang menentukan terjadinya diskontinuitas sejarah di Bali adalah mulai dilangsungkannya penataan birokrasi. Sampai dengan tahun 1854, pemerintah kolonial Belanda belum mengeluarkan suatu pengaturan baru untuk penguasa lokal. Mereka masih disibukkan oleh penataan birokrasi. Daerah Jembrana yang saat itu merupakan taklukan Buleleng, diangkat menjadi kerajaan sendiri. Jabatan bupati diserahkan kepada warga lokal yang di masa prakolonial termasuk orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara atas nama Kerajaan Jembrana. Pemerintah kolonial berjanji tidak akan melakukan intervensi dalam pemerintahan, asalkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Pemerintah kolonial juga akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan pertanian secara luas (KV, 1854, p. 1).

Penguasa yang ditunjuk ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Di sana-sani ditemukan praktik penindasan. Rakyat melapor dan meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Menyadari akan sulit bisa mempertahankan kekuasaannya, maka bupati dengan sukarela mengundurkan diri sesuai dengan bunyi kontrak tahun 1849. Kekuasaan atas Jembrana dipegang sendiri oleh aparat kolonial. Dengan demikian tidak perlu ada lagi rasa khawatir Jembrana akan dirongrong oleh raja-raja merdeka di sekitarnya. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, aparat kolonial dibantu oleh bupati dan patih yang dijabat oleh orang-orang lokal (KV, 1856, p. 34).

Fakta ini merupakan sebuah pengetahuan baru, di mana rakyat yang di masa kekuasaan monarki lebih banyak diam karena takut, kini punya tempat mengadu. Pertama kalinya rakyat Jembrana mendapatkan kenyataan bahwa orang yang dulu sangat dihormati dan ditakuti kini menjadi bawahan orang kulit putih. Sekalipun masih diberikan kuasa berbicara, namun harus selalu berdisiplin, dalam arti patuh dan berguna pada kebenaran yang terkandung pada wacana yang dilontarkan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara dalam jajaran pemerintah kolonial Belanda.

4.1.3 Perlawanan Pertama di Singaraja

Tidak semua orang lokal siap menerima pengetahuan baru. Di Gempol, Singaraja, muncul wacana bahwa pada akhirnya pemerintah kolonial menegakkan kekuasaannya, yang sudah pasti akan membebani rakyat Buleleng dengan sejumlah pekerjaan berat. Oleh karena itu, Bupati Buleleng harus menolak jika sampai diminta mengambil sumpah setia seperti yang dilakukan oleh Bupati Jembrana. Jika itu sampai terjadi, maka pemimpin perlawanan ini mengancam akan muncul persoalan besar di Buleleng.

Banyak orang yang mau berkompromi dengan wacana tersebut. Wacana itu didengar oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, karena itu pada tahun 1856 dikirim utusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Aparat kolonial yang ditugasi melaksanakannya diminta supaya tetap tenang dalam menjalankan tugasnya. Aktor intelektual wacana perlawanan itu ditangkap. Para pengikutnya menyerah, mau mengakui kesalahannya dan kembali berkompromi dengan pemerintah kolonial (KV. 1856, p.34).

4.1.3 Mulai muncul aksi demonstrasi

Pada tahun 1872 penguasa lokal yang ditunjuk sebagai wali pemerintah kolonial Belanda masih memakai pengetahuan lama dalam menjalankan kekuasaannya, namun rakyat mengeluh karena merasa dirugikan oleh tindakannya. Pada pertengahan pertama tahun 1872 kekecewaan rakyat memuncak yang dituangkan dalam setumpuk lontar diletakkan di depan

rumah asisten residen. Isinya berupa keluhan terhadap kesewenang-wenangan dan pemerasan dan memuat pula ancaman agar wali pemerintah itu segera menghentikan tindakannya. Setelah itu di berbagai distrik berulang kali terjadi aksi-aksi pembakaran dan penduduk tujuh desa bangkit melakukan perlawanan (KV, 1873, p. 26).

Pemerintah kolonial Belanda turun tangan. Mereka memaksa supaya wali pemerintah tersebut melepaskan sawah-sawah yang telah dikuasainya secara tidak sah, namun hanya sebagian saja yang dilepaskannya. Semakin lama tindakannya semakin berani melawan kekuasaan kolonial. Pada bulan Juli 1872, sambil menanti instruksi dari residen di Banyuwangi, jabatannya dibekukan dan diasingkan ke Surabaya bersama dengan sejumlah orang yang sepaham dengannya. Dua pungutan tak resmi yang dilakukannya secara sewenang-wenang sejak tahun 1870 pun dicabut (KV. 1873, p.26).

4.1.4 Perlawanan di Desa Banjar

Patahan sejarah terjadi lagi. Diawali dengan munculnya perlawanan di Desa Banjar, Buleleng Barat yang meletus tahun 1868. Perlawanan ini dipimpin seorang kepala distrik yang kehilangan jabatannya karena dianggap melakukan banyak kesalahan. Didukung oleh para pengikutnya, pemimpin perlawanan itu memaksa pemerintah kolonial Belanda supaya memberhentikan kepala distrik Banjar untuk digantikan olehnya. Melalui kerjasama kerabat dan beberapa kepala desa, pemimpin perlawanan itu berhasil menggerakkan penduduk Banjar agar membangkang dan tidak puas terhadap pimpinannya, kepala distrik tersebut (KV, 1869, p. 277).

Perlawanan terbuka tersebut dimulai sejak bulan Mei 1868. Penduduk Banjar menolak perintah raja, bupati Buleleng dan penguasa kolonial supaya tidak melibatkan diri dalam perlawanan itu. Mereka menghentikan pekerjaannya di sawah dan di jalan untuk ikut terlibat dalam gerakan perlawanan tersebut.

Semangat perlawanan ini semakin serius dan akhirnya juga dirasakan di distrik lain. Menghadapi kondisi tersebut, pada bulan Juli 1868 Residen Banyuwangi, bersama asisten residen, Bupati Buleleng, dan para pemimpin tinggi lokal mengadakan rapat guna memutuskan tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut (KV, 1869, p. 277)

Takut gerakan Banjar semakin meluas, maka pemerintah kolonial Belanda melakukan pamer kekuatan militer. Setelah pasukan bantuan ekspedisi dari Jawa datang, penduduk Banjar, Kalianget dan desa-desa lain yang mendukung perlawanan ini berhasil dipaksa menyerahkan diri. Beberapa orang yang melarikan diri termasuk pemimpin utamanya dan beberapa pemimpin perlawanan lainnya, sebagian besar ditangkap di Mengwi dan diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda (KV, 1869, p. 277)

Demikianlah, keruntuhan kerajaan Buleleng telah menjadi sebab-sebab terdekat dari munculnya diskontinuitas sejarah di Bali Utara. Bersamaan dengannya wacana yang diluncurkan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara di lingkaran pemerintah kolonial mulai menyatu dengan sistem sosial masyarakat, membentuk pengetahuan baru yang tidak ada sebelumnya. Akan tetapi tidak semua pengetahuan baru tersebut diterima begitu saja oleh masyarakat luas, seperti yang terjadi di Gempol dan Banjar seperti sudah disebutkan di atas.

Hanya saja fungsi kekuasaan bukan hanya untuk menekan, melalui mode penyensoran, pengucilan, pemblokiran, dan represi. Kekuasaan tidak hanya menjalankan dirinya secara negatif, namun ada pula yang produktif, di mana kekuasaan juga mampu menghasilkan efek-efeknya pada tingkat keinginan dan tingkat pengetahuan (Foucault, 1980) seperti diterangkan di bawah ini.

4.1.5 Kehidupan Para Petani Pasca Perang Banjar

Praktik kekuasaan produktif dapat dilihat di sektor pertanian. Tahun 1869 setelah berakhirnya perlawanan Banjar, di Jembrana, perlahan-lahan penduduk membangun kembali desa-desanya yang hancur. Para petani kembali bekerja. Mereka adalah petani yang baik, lahan dan saluran airnya dalam kondisi terawat. Sangat jarang terlihat mereka menekuni sektor perikanan. Profesi sebagai nelayan hanya dijalankan oleh beberapa orang penduduk pantai. Sebaliknya, pertanian di Buleleng sedikit terganggu akibat berjangkitnya wabah (KV, 1873, p. 27).

Biarpun sektor pertanian di Jembrana tampak lebih bagus daripada di Buleleng, namun sektor perdagangan ekspornya tidak ditopang oleh perilaku para petani pada umumnya. Terlihat dari hasil penjualan panen padi dipakai untuk membeli candu, sehingga di tahun 1872 sektor ini kurang menguntungkan, sedangkan tanaman kopi yang sangat rendah. Konsumsi candu bukan hanya ditemukan di Jembrana, tetapi juga di wilayah kerajaan-kerajaan merdeka pada umumnya. Dari semua kerajaan Bali, candu dikonsumsi di Tabanan, debetnya ditafsirkan 40 peti. Akan tetapi, fenomena konsumsi candu, tidak begitu berpengaruh terhadap pengadaan padi secara umum di Buleleng dan Jembrana. Kedua daerah ini dengan penduduknya sebanyak satu setengah juta jiwa masih bisa bersandar, mempertahankan hidup mengandalkan padi yang tersimpan lumbung (KV, 1873, p. 27).

Sejumlah penduduk juga ada yang bisa bertahan hidup dari terowongan air yang banyak ditemukan di Jembrana. Mereka diminta oleh warga Klungkung membuat terowongan pada gunung untuk bisa mengalirkan air sungai ke sebarangnya dan mengubah dataran di sekitarnya menjadi sawah. Pekerjaan

ini berjalan sukses sehingga muncul lagi tawaran berikutnya untuk tujuan yang sama (KV,1873, p. 27).

Peningkatan penghasilan tubuh sosial merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk meningkatkan kepatuhan rakyat kepada pemerintahan kolonial Belanda. Transformasi sejarah seperti ini akan ditemukan lagi pada diskursus pariwisata sekitar tahun 1914-1924 (Wijaya dan Singgih, 2020), yang semakin menjauhkan orang-orang Bali dari pengetahuan lama, yang ditandai dengan adanya pengakuan atas kapitalisme dan individualisme, suatu hal yang tidak ditemukan dalam episteme peradaban kerajaan, yang mengerucut pada kepatuhan terhadap raja, disebut *ngayah*.

4.1.6 Sekolah Barat

Praktik kekuasaan yang produktif juga dapat dilihat dari pembukan sekolah modern di Buleleng pada tahun 1874. Akan tetapi, minat orang-orang lokal masuk ke sekolah modern tidak begitu menonjol. Hanya ada seorang bangsawan asal Jembrana yang mau menyekolahkan dua orang anaknya ke Banyuwangi. Ada juga dua orang calon juru tulis dan juru bahasa dari kerajaan Gianyar dan Klungkung diberikan beasiswa untuk bersekolah di Banyuwangi (KV, 1875-1877, p. 27)

4.1.7 Bidang Kesehatan

Kekuasaan produktif juga menyebar secara halus melalui bidang kesehatan masyarakat, yang kemudian melahirkan pengetahuan baru di bidangnya. Kondisi kesehatan rakyat di Jembrana di tahun 1866 juga dinilai oleh pemerintah kolonial masih belum memuaskan. Demam buruk, sakit perut dan penyakit mata melanda penduduk secara bergantian. Pemerintah kolonial berusaha menanganinya melalui pengiriman sarana pengobatan dan sejauh mungkin memberikan bantuan. Berkat vaksinasi penduduk Jembrana demikian pula Buleleng, terbebas dari epidemi cacar yang melanda di tempat lain. (KV, 1867, p. 298)

Melalui diskursus kesehatan, pemerintah kolonial berusaha supaya rakyat dapat menerima program-program vaksinasi. Ini contoh kekuasaan produktif yang menjalar secara halus pada tubuh-tubuh sosial. Upaya ini berhasil, seperti terlihat pada kondisi kesehatan di Buleleng dan Jembrana pada umumnya memuaskan, kecuali di distrik Tegal Cangkring, Jembrana. Sejak akhir 1872 distrik ini dilanda demam parah sehingga sepersepuluh bagian penduduknya meninggal. Sarana obat-obatan yang disediakan oleh kontrolir hanya sedikit menguntungkan untuk menumpas penyakit itu. Rupanya wabah cacar itu tidak hanya menimpa Jembrana, tetapi seluruh Bali. Akan tetapi, Buleleng dan Jembrana bisa terhindar berkat penyuntikan vaksin yang

dilakukan oleh pemerintah kolonial. Padahal di tempat lain di Bali, penyakit ini meminta korban lebih dari 15 ribu orang. Pemerintah kolonial Belanda berinisiatif mengirim inspektur vaksin ke berbagai kerajaan di Bali pada tahun 1872 (KV, 1873 : 27).

4.1.8 Kapal Uap

Kekuasaan produktif juga menjaral secara harus melalui diskursus teknologi, yang efek-efeknya dapat dilihat melalui kapal uap, yang mulai keluar masuk di pelabuhan Buleleng (Lihat Foto 1). Keberadaan kapal uap semakin berpengaruh pada terjadinya peningkatan ekspor-impor yang di tahun 1875 mencapai angka f 11, hampir f 6 ½ darinya berasal dari impor candu.

Sebelum adanya kapal uap, perahu-perahu lokal (Lihat Foto 2) langsung berlayar dari Bali ke Singapura, Makasar, dan Jawa. Setelah adanya kapal uap, para pengeksport tinggal memindahkan muatannya, lalu menurunkannya di tengah laut untuk diteruskan ke daratan oleh perahu-perahu kecil. Didistribusikan kembali oleh perahu layar ke berbagai tempat tujuan.

Di tahun 1875, lima kali sebulan pelabuhan Buleleng dikunjungi oleh kapal uap milik Perusahaan Kapal Uap Hindia Belanda. Sebaliknya, komoditi ekspor yang diangkut dari Buleleng meliputi beras, kulit, kopi dan tembakau. Kopi dibeli langsung oleh eksportir dari penduduk senilai f 43 – 44 per pikul (KV, 1875-1877, p. 27).



Foto 1. Pelabuhan Buleleng (dipublikasikan tahun 1920) (Sumber: Digital Collections Leiden University Libraries)



Foto 2. Kapal layar di pelabuhan Buleleng (dipublikasikan tahun 1939) (Sumber: Digital Collections Leiden University Libraries)

4.1.9 *Masuknya Agama Kristen*

Retakan sejarah terjadi pula melalui agama. Sebelumnya, agama luar yang masuk ke Bali hanya Islam. Akan tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda mulai muncul agama Kristen. Masuknya agama Kristen diawali dengan kedatangan dua pendeta zending Yayasan Utrecht di Bali. Mereka diberikan izin oleh pemerintah kolonial Belanda untuk berkarya di Bali selama tahun 1866. Keduanya tinggal di Buleleng dan sibuk mempelajari bahasa Bali (KV, 1867, p. 298).

Sampai akhir tahun 1871 hasil dicapai oleh para zendeling masih sangat kecil. Namun tidak menyurutkan semangatnya menyebarkan agama Kristen. Kedua orang pendeta dari Yayasan Utrecht tersebut masih sibuk menyusun sebuah buku pelajaran bahasa Bali dan buku lainnya. (KV, 1873, p. 27)

4.2 *Situasi dan Kondisi Kerajaan-Kerajaan Merdeka*

4.2.1 *Peningkatan Suhu Politik*

Patahnya sejarah Bali abad XIX juga dapat dipelajari melalui aktivitas raja-raja merdeka. Di luar Buleleng, secara umum, setelah penaklukan kerajaan di Bali Utara, terjadi peningkatan suhu politik yang dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri Raja Klungkung. Orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara di negeri ini sepakat ingin menempatkan Raja Klungkung

sebagai *susuhunan* (junjungan) Bali dan Lombok seperti pendahulunya di zaman Gelgel (Gde Agung, 1989, p. 369).

Tidak semua raja lainnya patuh dan berguna pada diskursus tersebut. Pada kenyataannya, ada raja yang memiliki wilayah kekuasaan jauh lebih luas dan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Klungkung. Sawah-sawah kerajaan Badung misalnya, jauh lebih luas daripada milik Klungkung. Demikian pula Gianyar, sedang tumbuh menjadi negara yang kuat, makmur dan tenteram (Gde Agung, 1989: 368).

Rupanya hal ini merupakan hasil disartikulasi orang-orang yang mempunyai kuasa bicara di Klungkung atas wacana yang berkembang di tahun 1882, bahwa pemerintah kolonial telah menjadikan Buleleng sebagai pusat pemerintahan Karesidenan Bali dan Lombok menggantikan Banyuwangi. Orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara di Klungkung menangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam wacana tersebut untuk diolah menjadi wacana sekunder, bahwa raja-raja Bali harus menyatukan kekuatan untuk mengadakan perlawanan dengan cara membentuk persekutuan (Afscschrft No. 5, Mei 1893).

Keinginan menyatukan kekuatan raja-raja Bali rupanya tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain Bangli dan Klungkung, setelah runtuhnya Kerajaan Buleleng, Mengwi juga bermusuhan Gianyar. Namun karena jumlah penduduk Gianyar yang jauh lebih besar daripada Mengwi dan daerah perbatasannya sangat mudah dipertahankan, maka selama bertahun-tahun peperangan terbuka, Gianyar sulit dikalahkan. Apalagi orang yang mempunyai kuasa penuh di Gianyar sangat berpengaruh di wilayah kerajaannya sehingga mudah baginya mendapatkan dukungan rakyat (Afscschrft No. 5, Mei 1893).

Biarpun berseberangan politik dengan sejumlah kerajaan, namun Gianyar tetap merasa terlindungi, karena menjalin persahabatan dengan Karangasem, Badung, dan Tabanan. Akan tetapi, secara tak terduga tahun 1883 konstelasi politik berubah. Raja Klungkung dan Raja Gianyar sepakat mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menganggap kedua kerajaan ini sebagai suatu kesatuan di bawah pimpinan Klungkung. Semua persoalan yang menyangkut Gianyar supaya dibicarakan dengan Klungkung (Afscschrft No. 5, Mei 1893).

Pada akhirnya Gianyar berhasil dibujuk sehingga bersedia berkompromi dengan wacana besar penyatuan kerajaan-kerajaan Bali di bawah kepemimpinan Klungkung.

4.2.2 Runtuhnya Kepunggawaan Negara

Kesediaan Gianyar berkompromi dengan wacana besar penyatuan kerajaan-kerajaan Bali harus dicari pada sebab-sebab terdekatnya, yakni

semakin memburuknya situasi politik akibat pemberontakan Negara, salah satu wilayah kepunggawaan Gianyar. Sebelum melakukan pemberontakan, penguasa Negara membentuk pasukan koalisi meliputi Tampaksiring, Payangan, dan Blahbatuh.

Penguasa Negara juga pergi ke Batuan untuk mendapatkan dukungan dari penguasa setempat, namun gagal. Walaupun gagal mendapat dukungan Batuan, namun penguasa Negara memperolehnya dari orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara atas nama Sukawati. Dukungan yang lebih besar diperolehnya dari orang-orang yang mempunyai kuasa berbicara atas nama Klungkung berupa laskar perang sekitar 200 orang. Orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara atas nama Mengwi juga bersedia memberikan bantuan, namun baru sebatas janji. Dukungan dari orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara atas negerinya masing-masing itu membesarkan semangat penguasa Negara untuk melakukan serangan terhadap Gianyar (Dunia, 1984, pp. 75-76).

Terbukti akhirnya, tidak ada koalisi yang abadi dalam percaturan politik di Bali pada abad XIX. Setiap raja mencari kelengahan lawan-lawannya dan itulah yang terjadi di Gianyar. Penguasa Negara meniup genderang perang ketika orang-orang yang punya kuasa istimewa berbicara di Gianyar sedang bermain judi sabungan ayam di wantilan. Setelah terbukti memang benar ada pemberontakan, maka orang-orang yang punya kuasa berbicara di Gianyar segera mengambil tindakan. Penguasa Gianyar meminta supaya pemerintah Hindia Belanda segera memasukkan negerinya ke dalam wilayah kekuasaan kolonial Belanda dengan sistem *indirect role*. Permintaan itu ditolak pada 6 Februari 1885. Penolakan itu menyulitkan Raja Gianyar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya (Gde Agung, 1989, pp. 416-417).

4.2.3 Munculnya Kekuasaan Ubud

Perang Negara, membesarkan nama penguasa Ubud, salah seorang keturunan Raja Sukawati. Pada situasi yang tepat, penguasa Ubud berhasil membangun kembali kejayaan Kerajaan Sukawati. Dulu pendiri Kerajaan Gianyar hanya menjadikan Ubud sebagai punggawa, yang dipimpin oleh putra-putra Sukawati, di mana dia menjadi seorang abdi kerajaan. Akan tetapi, kini salah seorang keturunan pendiri Gianyar justru menyandarkan diri pada salah seorang generasi penerus Kerajaan Sukawati yang berkuasa di kepunggawaan Ubud, Tjokorda Gde Soekawati.

Walaupun tampil sebagai pemenang, namun penguasa Ubud selaku panglima perang tentara koalisi kerajaan pembela Gianyar tidak merusak dan menghancurkan istana Negara. Sebaliknya, justru mengizinkan keluarga penguasa Negara tetap tinggal di istananya. Hanya saja tidak berlangsung

lama, karena tanpa terduga olehnya muncul Perang Negara II yang berujung pada pembakaran istana. Nama Tjokorde Gde Soekawati semakin melambung setelah terlibat dalam perang Mengwi, sekalipun tidak berhasil mencegah keruntuhannya di tahun 1891, hanya sekitar enam bulan setelah Perang Negara II (Nordholt, 1996).

Runtuhnya Negara dan Kerajaan Mengwi, merupakan patahan baru dalam sejarah Bali abad XIX, yang menjadi sebab-sebab terdekat dari munculnya pengetahuan-pengetahuan baru dalam masyarakat Bali pada dekade terakhir abad XIX.

4.2.4 Patahnya Tradisi-tradisi Bali

Patahan sejarah juga terjadi pada sejumlah pengetahuan lama, berupa tradisi-tradisi yang dipandang relevan di zamannya, yang paling awal penghapusan *hak tawan karang*. *Hak tawan karang* mengatur menguasai semua barang dan harta benda kapal-kapal yang terdampar atau karam di laut dan dihanyutkan ombak ke tepi pantai. Penghapusan *hak tawan karang* tertuang dalam kontrak raja-raja Bali dengan pemerintah kolonial Belanda tahun 1841 (Gde Agung, 1989, pp. 159-160).

Selain hak pungut (tawan karang), pada tahun 1855 pemerintah kolonial Belanda juga mengatur larangan hukuman sisa tubuh atau potong badan. Termasuk juga menghapus tradisi *mesatia* atau *mabela* yakni menyusul kematian kerabat atau sahabat yang meninggal. Menghapus pula perdagangan manusia dan ekspor budak (KV, 1856, p. 34). Akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran dan puncaknya terjadi pada kasus *mesatia* di kerajaan Tabanan tahun 1903.

Tahun 1903 kekuasaan pemerintan Hindia Belanda mulai masuk ke tubuh kerajaan Tabanan, yang berlanjut dengan penetrasi budaya. Mereka mengkritisi tradisi pembakaran jenazah di kerajaan, dikenal dengan istilah *mesatia*. Pembakaran jenazah bekas penguasa Tabanan terjadi pada tanggal 25 Oktober 1903. Terdengar wacana bahwa tidak ada janda yang ikut *mesatia* bersama jenasanya di Tabanan. Sebelum meninggal, almarhum raja sudah memberitahu para istrinya supaya tidak ikut mati bersama dengan dirinya. Raja penggantinya wajib mencegah jika ada yang berniat *mesatia* (KV, 1904, p. 109).

Pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya percaya pada janji-janji itu. Tidak tertutup kemungkinan tradisi *mesatia* akan tetap terlaksana. Kekhawatiran itu selalu menghantuinya. Oleh karena itu residen diperintahkan untuk memberitahu raja supaya *mesatia* tidak terjadi lagi di daerahnya. Wacana larangan *mesatia* sudah digaungkan sejak tahun 1902. Akan tetapi hanya raja Gianyar dan Karangasem yang mampu membuktikan kesanggupannya untuk menghentikannya (KV, 1904, p.109).

Sebaliknya raja-raja lainnya menyatakan tidak keberatan terhadap diteruskannya kebiasaan ini karena bertumpu pada adat lama dan berkaitan pula dengan agama. Mereka juga merujuk pada kondisi bahwa tidak seorang pun dipaksa mengorbankan diri dengan cara ini. Atas dasar itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan wacana hanya dengan tindakan tegas sesegera mungkin kebiasaan *mesatia* dapat diakhiri. Oleh karena itu mereka menuntut raja Tabanan untuk menghapuskannya. Raja Tabanan tidak mengindahkannya (KV, 1904, p. 109).

Pada tanggal 12 Oktober 1903 Raja Tabanan menerima pemberitahuan bahwa pembakaran janda itu berlawanan dengan keinginan pemerintah kolonial Belanda. Pada 17 Oktober 1903 kontrolir yang menangani urusan penduduk lokal tiba di Tabanan guna membicarakan lebih lanjut masalah ini sekaligus menyampaikan keberatannya. Kembali tidak dihiraukan oleh raja Tabanan. Pada 29 September 1903 Raja melontarkan wacana bahwa kesertaan dua orang janda itu *mesatia* berlangsung secara sukarela, sehingga upacara akan berlangsung pada tanggal 2 Oktober 1903. Saat kedatangan kontrolir tanggal 17 Oktober jadinya sudah terlambat untuk membatalkannya (KV, 1904, p. 109).

Setelah pembicaraan yang memakan waktu cukup lama, kontrolir mendapat kesan bahwa orang-orang yang mempunyai kuasa istimewa berbicara atas nama Tabanan tampak ragu-ragu bahwa apakah benar larangan itu berasal dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Wacana tersebut dibalas dengan wacana pula, larangan melakukan *mesatia* mungkin akan dihormati bila ada tekanan dengan pengiriman kapal perang. Hal yang serupa pernah dilakukan di Klungkung untuk menyelesaikan persoalan tradisi *mesatia*. Hal yang sama juga akan dilakukan di Badung, namun hari pelaksanaan upacaranya masih jauh (KV, 1904, p. 109).

Pemerintah kolonial Belanda ternyata benar-benar merealisasikan wacana tersebut. Kapal perang *Gelderland* dan *Koningin Regentes* pun berlayar ke Tabanan dan tiba di lokasi pada 23 dan 25 Oktober 1903. Di depan para perwira laut, kontrolir mencoba kembali membujuk Raja supaya tidak melakukan tradisi *mesatia*, tetapi sia-sia. Raja berjanji akan menghapuskan tradisi *mesatia* asalkan raja-raja lain di Bali menyetujuinya.

Pada tanggal 25 Oktober 1903 pembakaran dua janda itu berlangsung. Sebagai bentuk protes, kontrolir dan perwira laut meninggalkan tempat itu dan kembali ke kapal. Raja Badung dan Klungkung, yang yakin pemerintah Hindia tidak akan mampu memaksakan kehendaknya, justru mendukung perlawanan Raja Tabanan. Sebagai respon atas peristiwa itu, kontrolir menyampaikan surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berisikan kekecewaannya secara serius (KV, 1904, p. 109).

Bersamaan dengannya dilakukan pencabutan sementara atas keputusan pemerintah kolonial Belanda tanggal 7 Oktober 1903 nomor 3 yang menyetujui dan mengesahkan pengukuhan atas raja Tabanan. Raja Tabanan pun dituntut untuk melakukan dua hal. Pertama, agar dia membuat kontrak baru yang mewajibkannya dan juga para penggantinya menghapus adat *mesatia*. Tidak lagi menerapkan adat membakar janda raja atau keluarganya atau siapapun juga bersama dengan jenazah suaminya. Kedua, mengirimkan utusan yang terdiri atas kerabat dekat untuk meminta maaf kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (KV, 1904, p. 109).

4.2.5 Runtuhnya Kekuasaan Raja-raja di Bali Selatan

Salah satu diskursus penting yang muncul di Bali pasca kejatuhan kerajaan-kerajaan di Bali Selatan adalah munculnya keputusan pemerintah kolonial Belanda tanggal 6 Juli 1908 nomor 37 (Lembaran Negara nomor 443) daerah Badung dan Tabanan digabungkan dengan daerah kantong Sibang dan Abeansamal yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda melalui kontrak politik dengan Klungkung. Termasuk pula distrik Anggantaka, Sedang, Blahkiuh dan Carangsari yang dipisahkan dari Gianyar. Dengan para kepala distrik dan kepala daerah lainnya di Badung dan Gianyar demi menciptakan kondisi yang lebih baik di berbagai bidang. Di Badung dilakukan pembebasan para budak dan anak semang, sedangkan di Tabanan para punggawa atas nama para pemilik budak dan anak semang melaporkan kepada kontrolir bahwa mereka memberikan kebebasan kepada semua tahanan itu (KV 1909, p. 88).

Demikianlah diskontinuitas sejarah Bali abad XIX yang diawali dengan runtuhnya kerajaan Buleleng telah memberi peluang bagi masuknya pengetahuan baru dalam sistem sosial masyarakat yang melahirkan episteme baru yang terkait dengan sejarah pengetahuan pada umumnya.

4.3 Daya Jangkau Dokumen Kolonial

Dokumen *Koloniaal Verslag* tidak mampu memberikan data mengenai sejarah pemikiran, sejarah filsafat, dan sejarah sastra di Bali abad XX. Oleh karena itu diperlukan bantuan sumber lain untuk melengkapinya, yang bisa dicari dan ditemukan dalam karya sejumlah peneliti asing, antara lain dapat dilihat di bawah ini.

4.3.1 Politik, Masyarakat, Agama, dan Budaya Bali

Studi terdahulu mengenai politik, masyarakat, agama, dan budaya Bali awal abad XX dapat ditemukan pada karya Creese (2016). Ia berhasil meneruskan kesaksian Pierre Dubois, pejabat kolonial pertama yang tinggal di Bali, dari 1828-1831. Dubois menjabat sebagai Administrator Sipil di istana

Badung di Bali selatan. Dia kemudian mencatat pengalamannya di Bali untuk “Batavia Society of Arts and Sciences” dalam serangkaian surat pribadi kepada seorang koresponden anonim. Suratnya itu disebut sebagai karya Etnografi pertama Bali ini berisikan deskripsi yang mendalam dan kaya perseptif tentang politik, masyarakat, agama, dan budaya Bali awal abad ke-19.

4.3.2 *Ritual dan Upacara Publik yang Besar*

Geertz (1980) mampu memberikan informasi negara Bali pra-kolonial bukanlah “birokrasi hidrolis” atau despotisme oriental, melainkan tontonan yang terorganisir. Para bangsawan penguasa kurang tertarik untuk mengatur kehidupan orang Bali. Mereka lebih suka mendramatisasi peringkat orang Bali, sehingga selalu mengejar keunggulan politik melalui ritual dan upacara publik yang besar. Proses budaya ini tidak mendukung negara, menurutnya, tetapi negara itu sendiri. Negara meliputi kehidupan istana, tradisi yang mengaturnya, ekstraksi yang mendukungnya, hak istimewa yang melekat padanya, diarahkan untuk mendefinisikan kekuasaan dan kekuatannya di sisi lain. Raja-raja datang dan pergi dalam suatu istana, dianonimkan dalam gelar, dilumpuhkan dalam ritual, dan dimusnahkan dalam api unggun. Tujuan utama politik adalah membangun sebuah negara, yang kemudian dikenal sebagai negara teater.

4.3.3 *Sejarah Seni*

Worsley (2020) berbicara mengenai lukisan Bali dari abad ke-19 dan awal abad ke-20. Melalui karyanya ini dapat diketahui bagaimana pelukis dan karyanya berbicara kepada pemirsanya tentang bagaimana orang Bali pada periode ini mengetahui, membayangkan, berpikir, dan merasakan tentang dunia di mana mereka hidup, tentang representasi visual, komunikasi ide-ide, imajinasi, dan perasaan melalui medium lukisan naratif. Worsley membahas lima lukisan Bali tentang Malat.

Duplikasi praktik kultural di abad XIX tersebut ditemukan di masa kini, yang bahkan menjadi penopang industri pariwisata Bali.

5. **Simpulan**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, ada tiga hal penting dapat dipetik dari kajian ini. Pertama, sejarah Bali Abad XIX ditandai dengan munculnya diskursus atau wacana mengandung pengetahuan yang pada akhirnya mengubah episteme (cara orang melihat kenyataan) dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan raja. Raja yang sebelumnya dihormati dan ditakuti, kini menjadi orang biasa, yang kekuasaannya tidak lagi memiliki kekuatan menghukum.

Kedua, diskontinuitas sejarah Bali abad XIX menjadi tak terhindarkan karena semenjak runtuhnya kerajaan Buleleng tahun 1849, realitas peradaban tidak lagi disokong oleh pengetahuan lama, tetapi pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu menyangkut banyak hal, antara lain dibidang kesehatan, perdagangan, pelayaran, dan pendidikan.

Ketiga, selain memiliki kelebihan, ternyata dokumen *Kolonial Verslag* juga mengandung kekurangannya. Kelebihannya, dokumen tersebut memberikan data sejarah yang terperinci, suatu hal yang tidak ditemukan dalam sumber sejarah tradisional. Kekurangannya, subjektivitas dokumen tersebut relatif tinggi, karena sekaligus merupakan laporan residen mengenai situasi dan kondisi politik di kerajaan-kerajaan merdeka sehingga memudahkannya untuk melakukan penaklukan di kemudian hari. Oleh karena itu, bagaimana juga sejarah diskontinuitas Bali abad XIX yang meliputi sejarah pemikiran, sejarah pengetahuan, sejarah filsafat, dan sejarah sastra masih memerlukan bantuan hasil karya peneliti asing.

Daftar Pustaka

- Adian, D.G. (2002). "Berfilsafat Tanpa Sabuk Pengaman: Sebuah Pengantar." dalam Rabinow Paul. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault*. (terj. Arief). Yogyakarta: Jalasutra.
- Ankersmit, R. (1987) *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, (terj. Dick Hartoko). Jakarta: PT. Gramedia.
- Arnas RI (1893) "Voor De Resident Bali en Lombok, Afscschrft No. 5 Geheim Bijlengen 13, Boeileleng, 25 Mei 1893, De Controleur (wg) J.H. Lieftrinck voor eensluitend Afscschrft De Secretaries van Bali en Lombok." Dokumen. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ur, A. (2006). "Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban." *Teori-teori Kebudayaan*, Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Bagus, I.G.N.(1969). "Pertentangan Kasta dalam Bentuk Baru pada Masyarakat Bali" Denpasar: Jurusan Antropologi, 1969
- Bagus, I.G.N.(1974). "Surya Kanta: Modern Kewangsaan Movement of The Jaba Caste in Bali." Makakah Udayana University.
- Bagus, I.G.N. (1975). "Surya Kanta Modern Kawangsaan Movement of The Jaba Caste in Bali." *Masyarakat Indonesia*, Vol. II. No. 2 Jakarta: LIPI.
- Costa, C. and Mark, M. (2015). *Bourdieu, Habitus and Social Research*. London: Palgrave Macmillan.

- Creese, H. (2016) *Bali in the early Nineteenth Century. The ethnographic Accounts of Pierre Dubois*. Leiden: Brill, 2016, xx + 826 pp. [Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 305]. ISBN 978904315822. Price: EUR 139.00 (*hardback*).
- Dunia, I.W. (1984). "Pemberontakan Tjokorde Oka Negara di Gianyar Tahun 1884-1890. Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavstock Publications.
- Foucault, M. (1977). "Nietzsche, Genealogy, and History." Dalam *Language, Counter Memory, Practice: Slwcted Essay and Intertiew*. D.F. Bourchard (ed.). Ithaca: Cornell, Part II.
- Foucault, M.. (1997). *Sejarah Seksualitas : Seks dan Kekuasaan*. (Terj. Rahayu. S. Hidayat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. The Harvester Press.
- Foucault, M. (1982) *The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language*. English tr. Disunting & diterjemahkan oleh A. M. S. Smith. New York: Pantheon Books. doi: 10.2307/j.ctvh1dk49.6.
- Gde Agung, I.A.A. (1989). *Bali Pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-Raka Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre in Nineteenth-Century Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hobart, M.. (2000). *After Culture Anthropology as Radical Metaphysical Critique*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Hunt, Lynn, (ed). 1989. *The New Cultural History* (Barkeley: University of California Press
- Kebung, K. (2002). "Kembalinya Moral melalui Seks," *Basis*, No. 01 – 02, Tahun Ke- 51, Januari-Februari.
- Perpusnas Indonesia. (1850). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1854). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1856). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1867). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1869). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1871). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1873). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- Perpusnas Indonesia. (1875-1877). "Koloniaal Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."

- Perpusnas Indonesia. (1904). "Kolonial Verslag over het jaar (Bali en Lombok)." Perpusnas Indonesia. (1909). "Kolonial Verslag over het jaar (Bali en Lombok)."
- McCullagh, C.B. (1998). *The Truth of History*. London: Routledge.
- McCullagh, C.B. (1999). *The Truth of History*. London: Routledge.
- McCullagh, C. B. (2004). *The Logic of History*. London: Routledge.
- Munslow, A. (1997). *Deconstructing History*. USA and Canada: Routledge.
- Neuman, W. L. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. London UK: Pearson Education Limited.
- Nordholt, H.S. (1996). *The Spell of Power: A history of Balinese politics 1650-1940*. Leiden: KITLV Press.
- Nordholt, H.S. (1981) "The Mads Lange Connection: A Danish Trader on Bali in the Middle of the Nineteenth Century: Broker and Buffer." *Indonesia* No. 32 (Oct., 1981), pp. 16-47 (32 pages). <https://doi.org/10.2307/3350854>
<https://www.jstor.org/stable/3350854>
- Nordholt, H.S. (2002), *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panetja, G. (1986). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas.
- Putra Agung, A.A.G. (2001a). *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra Agung, A.A.G. (2001b). *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Vickers, A. (1989). *Bali a Paradise Created*. California: Periplus.
- Wijaya, N. (2013). "Puri Kesiman: Saksi Sejarah Kejayaan Kerajaan Badung." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*. Vol.03 No. 01 April 2013. Hlm 33-64.
- Wijaya, N. (2010). "Mencintai diri sendiri: Gerakan Ajeg Bali dalam sejarah kebudayaan Bali 1910–2007/." Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, N. (2012). *Menerobos Badai: Biografi Intelektual Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus*. Denpasar : Pustaka Larasan.
- Wijaya, N. (2015). "Relasi-Relasi Kuasa dalam Praktik Agama Hindu Yang 'Ditemciptakan' di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* Vol.05. No.2 Oktober 2015. 391-412.
- Wijaya, N. (2022). "Kekuasaan dan Leluhur Keturunan Arya Wiraraja di Bali dalam Kajian Sejarah Genealogi." Vol 12 No 1 (2022): Volume 12 No. 1. April 2022 243-262. DOI : <https://doi.org/10.24843/JKB.2022.v12.i01.p12>

- Wijaya, N and Singgih T.S. (2020) "Colonial Tourism, Politics, Religion, and Ethnicity: Development of Denpasar City, Bali, The Netherlands Indies, 1906 – 1924." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*. ISSN: 1567-214X Vol 17 No 2, Juni 2020. PalArch's Foundation. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/320/313>
- Worsley, P.. (2022). "The rhetoric of paintings; The Balinese Malat and the prospect of a history of Balinese ideas, imaginings, and emotions," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*: Vol. 21: No. 2, Article 7. DOI: 10.17510/wacana.v21i2.870. <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol21/iss2/7>

Profil Penulis

I Nyoman Wijaya Guru Besar Ilmu Sejarah di FIB Unud. Lulusan UGM mulai dari S1, S2, S3. Base Camp di Progran Doktor (S3) di Prodi Kajian Budaya, FIB Unud. Tertarik mempelajari sejarah budaya dan politik dengan memakai pendekatan postmodern.